

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap relasi kuasa antara aktor intermediary dan pemerintah yang mengambil studi kasus di Yayasan SATUNAMA diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola hubungan antara pemerintah dengan SATUNAMA masuk dalam kategori pola demokratis, yaitu tidak ada tempat tertinggi antara pemerintah dengan SATUNAMA. Posisi antar kedua lembaga tersebut setara dan SATUNAMA sebagai LSM dan gerakan sipil memposisikan diri setara dengan pemerintah. Pemerintah tidak lagi melakukan dominasi seperti yang pada umumnya diketahui bahwa banyak LSM yang menggunakan pola otoritarian dengan pemerintah. Meskipun ada beberapa pemerintah yang merasa diri sebagai superior dan ingin segala hal berjalan sesuai dengan kemauan mereka, SATUNAMA tetap teguh dan menjalankan program yang sesuai dengan visi misi mereka yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pola hubungan transisional juga terlihat dalam hubungan relasi ini. SATUNAMA membuat sosok dominan dari pemerintah atau negara tidak lagi ada dan memunculkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hambatan dalam kerjasama SATUNAMA

dengan pemerintah terkait pola pikir yang berbeda yang terkadang dalam program pemerintah tidak mementingkan kualitas dan hanya berfokus pada kuantitas saja, sehingga pada akhirnya masyarakat tidak benar-benar mendapat dampak yang baik dari suatu pembangunan. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan SATUNAMA, yang hingga akhirnya perbedaan pendapat itu dapat membuat pembatalan kerjasama SATUNAMA dengan pemerintah. Namun, SATUNAMA masih tetap mempertahankan ideologinya sebagai LSM yang menjadi gerakan masyarakat sipil. LSM yang benar-benar melakukan segala kebijakan dan kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Pola hubungan ini tidak lagi diwarnai dengan ketegangan, konflik, bahkan perlawanan dari masyarakat. SATUNAMA menanggapi hal itu dengan melakukan pendekatan, lobi, dan intervensi kepada kebijakan pemerintah yang dinilai sebagai produk politik yang ada hanya menguntungkan pemerintah. Pola-pola hubungan diatas menunjukkan relasi dari posisi SATUNAMA dengan Pemerintah DIY.

3. Relasi kuasa yang terjalin antar SATUNAMA dengan pemerintah DIY dapat dikatakan sebagai model kemitraan (*partnership*). Model kemitraan merupakan model hubungan yang dibentuk dari dua pihak yaitu SATUNAMA dan pemerintah. Model kemitraan

yang ada dalam relasi kuasa antara SATUNAMA dengan pemerintah dibentuk dengan kepercayaan satu sama lain dan kesetaraan karena tidak ada yang mendominasi diantara kedua lembaga tersebut. Sehingga masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan masyarakat politik bersama dengan pemerintah dapat bekerja sama. terkadang program pemerintah ada yang berbenturan dengan kegiatan dari SATUNAMA sehingga yang muncul adalah kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap kegiatan SATUNAMA.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis data, maka penulis mencoba memberikan rekomendasi bahwa relasi sangatlah penting adanya dalam menjalankan sebuah organisasi maupun komunitas. Namun dalam hal relasi jangan jadikan sebagai wadah untuk memperkaya kekuasaan melainkan untuk membuka relasi demi kemajuan organisasi atau komunitas tersebut untuk bisa sukses dalam menjalankan program atau kegiatan untuk masyarakat.

Penelitian ini belum komprehensif karena hanya melihat relasi kuasa aktor intermediary dengan Pemerintah. Padahal, dari hasil analisis didapati bahwa relasi kuasa yang lebih besar terjadi antar LSM SATUNAMA dengan Lembaga Donor. Maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti tentang relasi kuasa yang terjadi di SATUNAMA

bisa berfokus ada relasi kuasa yang ada anta SATUNAMA dengan Lembaga Donor.